

1. tertinggi dalam wilayah kerja puskesmas. Penjadualan kegiatan ini disepakati melalui forum rembung desa.

Meskipun berbagai kebijakan PSN telah dikeluarkan baik di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa bahkan sampai RT / RW namun kasus DBD di Kabupaten Jepara tetap tinggi. Bahkan kasus DBD cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Studi pendahuluan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2011 dengan melakukan wawancara terhadap 20 responden anggota masyarakat yang dipilih secara acak dari 4 wilayah puskesmas (2 puskesmas dengan kasus DBD tertinggi dan 2 puskesmas dengan kasus terendah) tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan / program PSN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 12 dari 20 responden berpendapat bahwa pelaksanaan PSN merupakan tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan dan jumentik. Alasannya adalah petugas kesehatan menerima gaji dari pemerintah dan jumentik menerima insentif atau honor dari Dinas Kesehatan. Gambaran ini menunjukkan masyarakat belum mengerti bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan DBD yang paling efektif adalah melalui penggerakan Peran Serta Masyarakat (PSM) dengan gerakan PSN seperti tertera dalam Kepmenkes Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992. Jadi penyampaian informasi (faktor komunikasi) tentang kebijakan PSN-DBD belum diterima / ditangkap oleh masyarakat secara jelas.

Penulis juga melakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara, Kepala Seksi P2P DKK Jepara, *Programer* DBD Seksi P2P DKK Jepara dan Kepala Puskesmas Keling 1 tentang implementasi kebijakan terbaru (PSN plus larvasidasi massal)